

The Effect of Population, Investment and Regional Expenditure against Regional Income and Human Development Index in Berau District, East Borneo Indonesia

Endah Susanti
hadneseven@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the Effect of Population, Investment and Regional Expenditure against Regional Income and Human Development Index of Berau District during period 2014-2018.

This research is a causality research that analyze the direct and indirect effect of some independent variables and on the dependent variable by using path analysis. Variable used is variable of Population and Investment and Fregional Expenditure to regional income and Human Development Index of Berau district.

The results showed that the variable of population, and Regional Expenditure did not directly affect the regional income in Berau District. The investment variable has a direct and significant effect on the regional income in Berau District. The variable of population, investment, Expenditure, and regional income did not significantly affect the human development index in Berau District. Variables of population, investment, regional expenditure indirectly affect the human development index through regional income in Berau District

Keywords: Population, Investment, Regional Expenditure, Regional income, Human Development Index

I. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperbanyak pilihan pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. United Nations Development Programme (UNDP) melalui *Human Development Report*

dalam publikasinya menyatakan pembangunan manusia sebagai “a process of enlarging people’s choices” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat (Harahap, 2013).

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga yaitu: 1) Panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup); 2) Terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah

dasar, lanjutan dan tinggi); 3) Memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/PPP, penghasilan). IPM dinyatakan dalam skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 100 (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi) (bps.go.id).

Tidak dapat dipungkiri bahwa risiko dari tingginya laju pertumbuhan penduduk berakibat pada permasalahan-permasalahan sosial seperti pengangguran, kriminalitas, penderita gizi buruk, ketidaksediaan pangan dan tak terkecuali kemiskinan. Kemiskinan menjadi akibat yang ditimbulkan oleh tingginya pertumbuhan suatu wilayah jika tidak ditangani dengan tepat oleh pemerintah. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Berau selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2017) mengalami fluktuatif, bahkan cenderung turun sejak 2013 yang memiliki laju pertumbuhan sebesar 3,03 persen menjadi hanya 2,69 persen pada 2017.

Laju pertumbuhan mungkin mengalami penurunan, namun secara jumlah penduduk Berau mengalami

peningkatan. Berdasarkan data yang diambil dari Kabupaten Berau dalam angka 2018, jumlah penduduk Berau pada 2017 sebesar 220.601 jiwa, bertambah 23.213 jiwa selama kurun

Pada 2018 telah dirilis jumlah penduduk miskin Kaltim sebanyak 218.896 jiwa atau sebesar 6,03 persen, turun dibanding dengan jumlah pada 2017 dengan bulan yang sama yakni sebesar 220.166.

Untuk Kabupaten Berau, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 11.863 jiwa pada 2017 menjadi 11.333 jiwa pada 2018. Dengan jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan apresiasi harus kita berikan kepada pemerintah yang telah berupaya mengentaskan kemiskinan dengan berbagai programnya. Salah satunya melakukan reformasi anggaran subsidi, subsidi BBM dialihkan ke alokasi Dana Desa dan Transfer Daerah serta memperbesar alokasi anggaran untuk bantuan-bantuan langsung ke masyarakat miskin. Namun, program ini belum secara menyeluruh dirasakan masyarakat, perlu ada program lain yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Meski mengalami penurunan, namun ternyata tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan justru mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Sementara, indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada 2018 mengalami peningkatan sekitar 0,08 poin menjadi 0,57 dari sebelumnya 0,49 tahun 2017. Nilai indeks keparahan pada 2017 sempat menyentuh angka 0,07 yang berarti distribusi pendapatan di antara penduduk miskin hampir merata, namun di 2018 kembali mengalami ketidakmerataan di antara penduduk

miskin sebanyak 0,04 poin menjadi 0,11.

Angka IPM di Kabupaten Berau cenderung membaik. Pembangunan Manusia di Berau sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia yang dipublikasikan oleh UNDP yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kenaikan IPM disebabkan adanya berbagai program pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota seperti program di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi dan peningkatan kualitas sarana prasarana masyarakat lainnya. Keberhasilan program tersebut juga tergantung pada pola pikir masyarakat setempat dalam pemanfaatan sarana. Perlu disadari bahwa investasi pembangunan dalam rangka pembangunan manusia yang dilihat dari nilai IPM, hasilnya tidak langsung berdampak di tahun berikutnya. Misalnya, usahapeningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) yang dimanifestasikan dalam program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, hasilnya akan terasa pada

beberapa tahun kemudian (Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2013).

Dilihat dari dampaknya, investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu investasi publik ataupun swasta, karena investasi akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Masyarakat yang sebelumnya menjadi pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen IPM juga akan meningkat.

Kondisi IPM di Kabupaten Berau dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Di mana, dari tahun 2010 IPM Berau berada di angka 69,16 pada tahun 2011 naik 70,43 dan pada tahun 2015 berada di angka 72,72 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Berau pada tahun 2017 berada di angka 73,56 yang masuk dalam kategori tinggi, dan terus meningkat di tahun 2018 angka IPM Kabupaten Berau meningkat di angka 74,01.

Dalam penelitian ini indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan investasi serta belanja daerah, indeks pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, apabila PAD mengalami peningkatan maka pemerintah akan melakukan pengeluaran yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Berau maka secara langsung akan mampu mendukung tercapainya indeks pembangunan manusia yang diharapkan. Pada kenyataannya belum adanya pemerataan indeks pembangunan manusia di beberapa daerah di Kabupaten Berau serta pendapatan daerahnya sehingga hanya daerah tertentu saja yang mengalami pembangunan optimal yang tidak diikuti oleh daerah lainnya.

Berdasarkan fenomena yang ada tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, Investasi dan belanja daerah terhadap PAD dan IPM di Kabupaten Berau.

II. Landasan Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk.

Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Lukman (2006:71) Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 yaitu:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Bagian laba usaha daerah
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah

PAD menurut Halim (2004: 78) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa PAD merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan dari pajak. Lebih besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. Penduduk

Menurut Maltus dalam (Arsyad, 2005: 121) kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua-kalilipat setiap 30-40 tahun. Sementara itu pada saat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan

pangan tidak bias mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit diatastingkat subsiten.

5. Investasi Swasta

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Kegiatan investasi dalam suatu perekonomian dapat mendorong naik turunnya tingkat perekonomian negara yang bersangkutan karena mampu meningkatkan produksi dan kesempatan kerja.

Investasi merupakan pengeluaran perusahaan dan pemerintah secara keseluruhan untuk membeli barang-barang modal riil

6. Belanja Daerah

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

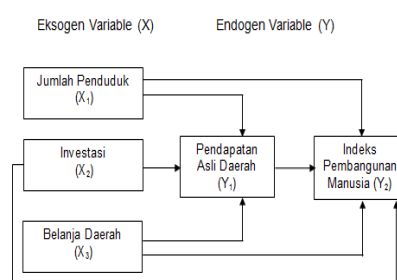
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Halim (2004: 81) mengemukakan bahwa:

“Belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana”.

Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan untuk memberikan gambaran konsepsi pemikiran, maka dapat dilihat kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1: Kerangka Konseptual Analisis jalur (path analysis)

Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan teori-teori yang telah diuraikan maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.
2. Variabel investasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.
3. Variabel belanja daerah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.
4. Variabel jumlah penduduk berpengaruh langsung dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Berau.
5. Variabel investasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Berau.
6. Variabel belanja daerah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Berau.
7. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Berau.
8. Variabel jumlah penduduk berpengaruh tidak langsung terhadap indeks pembangunan

manusia melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.

9. Variabel investasi berpengaruh tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.
10. Variabel belanja daerah berpengaruh tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Struktur pertama: melihat pengaruh langsung variabel jumlah penduduk (X_1), variabel investasi (X_2), dan variabel belanja daerah (X_3) terhadap pendapatan asli daerah (Y_1)

Struktur kedua: melihat pengaruh langsung variabel jumlah penduduk (X_1), variabel investasi (X_2), dan variabel belanja daerah (X_3) terhadap pendapatan asli daerah (Y_1) dan indeks pembangunan manusia (Y_2)

Alat Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai dan sebagai upaya membuktikan kebenaran hipotesis maka metode analisis yang digunakan sebagai peralatan pengolahan data adalah

analisis kuantitatif pada analisis jalur (*path analysis*) melalui software SPSS

Struktur pertama: melihat pengaruh langsung variabel jumlah penduduk (X_1), variabel investasi (X_2), dan variabel belanja daerah (X_3) terhadap pendapatan asli daerah (Y_1):

$$Y_1 = P_{Y_1X_1} X_1 + P_{Y_1X_2} X_2 + P_{Y_1X_3} X_3 + \varepsilon$$

Struktur kedua: melihat pengaruh langsung variabel jumlah penduduk (X_1), variabel investasi (X_2), dan variabel belanja daerah (X_3) terhadap pendapatan asli daerah (Y_1) dan indeks pembangunan manusia (Y_2):

$$Y_2 = P_{Y_2X_1} X_1 + P_{Y_2X_2} X_2 + P_{Y_2X_3} X_3 + P_{Y_2Y_1} Y_1 + \varepsilon$$

IV. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bab terdahulu maka untuk mengetahui pengaruh variabel Jumlah Penduduk, Investasi swasta dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Berau digunakan alat analisis Path dengan langkah pertama menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi swasta dan Belanja Daerah terhadap PAD. Hasil analisis pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi

swasta dan Belanja Daerah terhadap PAD dapat dilihat dari tabel berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,763	4,228		2,309	,041
X1	,155	,286	,109	,544	,597
X2	-,683	,145	-,678	4,724	,001
X3	,625	,336	,358	1,862	,089

Berdasarkan tabel di atas pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri dari Jumlah Penduduk (X_1), Investasi swasta (X_2), dan Belanja Daerah (X_3), terhadap PAD (Y_1) dapat dijelaskan seperti berikut: Pada fungsi 1 (sub-struktur-1), variabel eksogen = X_1 , X_2 , X_3 , dan variabel endogen Y_1 dapat diketahui persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,155 X_1 - 0,683 X_2 + 0,625 X_3$$

Berdasarkan model persamaan yang telah dihasilkan diatas, selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Koefisien Jumlah Penduduk (X_1) sebesar 0,155, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan jumlah penduduk (X_1) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka PAD (Y_1) akan mengalami kenaikan sebesar 0,155%. Koefisien bernilai

positif artinya terjadi hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap PAD, dimana semakin naik jumlah penduduk maka akan semakin meningkatkan PAD Kabupaten Berau.

- b. Koefisien Investasi swasta (X_2) sebesar -0,683, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan Investasi swasta (X_2) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka PAD (Y_1) akan mengalami penurunan sebesar 0,683%. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Investasi swasta terhadap PAD, dimana semakin naik nilai investasi swasta maka akan semakin menurunkan PAD Kabupaten Berau.
- c. Koefisien Belanja Daerah (X_3) sebesar 0,625, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan Belanja Daerah (X_3) mengalami kenaikan 1%, maka PAD (Y_1) akan mengalami kenaikan sebesar 0,597%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Belanja Daerah terhadap PAD dimana semakin naik nilai Belanja Daerah maka akan semakin

meningkat pula PAD Kabupaten Berau.

Dari tabel hasil analisis regresi linier berganda pada di atas dapat kita lihat bahwa hasil uji t pada variabel jumlah Penduduk (X_1) diperoleh signifikansi sebesar 0,597 yang nilainya di atas 0,05. Artinya variabel jumlah Penduduk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Berau.

Nilai signifikasni variabel Investasi swasta (X_2) sebesar 0,001 yang nilainya di bawah 0,05. Artinya variabel Investasi swasta secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Berau.

Belanja Pemerintah (X_3) seperti diperoleh signifikansi sebesar 0,089 yang nilainya di atas 0,05. Artinya variabel Belanja Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Berau

Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi swasta, Belanja Daerah, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Berau

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7,472	58,089		-,129	,900
X1	2,149	3,265	,193	,658	,525
X2	,314	2,839	,040	,111	,914
X3	-1,568	4,343	-,116	-,361	,726
Y1	5,877	3,400	,757	1,729	,115

Pada fungsi 2 (sub-struktur-2), variabel eksogen = X_1 , X_2 , X_3 , Y_1 dan variabel endogen Y_2 dapat diketahui persamaan sebagai berikut:

$$Y_2 = 2,149 X_1 + 0.341 X_2 - 1,568 X_3 + 5,877 Y_1$$

Berdasarkan model path yang telah dihasilkan diatas, selanjutnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Koefisien Jumlah Penduduk (X_1) sebesar 2,149, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan jumlah penduduk (X_1) mengalami kenaikan sebesar 1%, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami kenaikan sebesar 2,149%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara jumlah penduduk terhadap IPM, dimana semakin naik jumlah penduduk maka akan semakin

meningkatkan IPM Kabupaten Berau.

- b. Koefisien Investasi swasta (X_2) sebesar 0.341, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan Investasi swasta (X_2) mengalami kenaikan 1%, maka IPM (Y_2) akan mengalami kenaikan sebesar 0.341%. koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara investasi swasta terhadap 0.341%, dimana semakin naik nilai Investasi swasta maka akan semakin meningkat pula IPM Kabupaten Berau.
- c. Koefisien Belanja Daerah (X_3) sebesar -1,568, artinya jika variabel eksogen lainnya bernilai tetap dan Belanja Daerah (X_3) mengalami penurunan sebesar 1%, maka IPM (Y_2) akan mengalami penurunan sebesar 1,568%. Koefisien bernilai negative artinya terjadi hubungan negatif antara belanja pemerintah terhadap IPM, dimana semakin naik nilai belanja daerah maka akan menurunkan IPM Kabupaten Berau.
- d. Koefisien PAD (Y_1) sebesar 5,877, artinya jika variabel PAD (Y_1) mengalami kenaikan 1%, maka IPM (Y_2) akan mengalami kenaikan

sebesar 5,877%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara PAD terhadap IPM, dimana semakin naik nilai PAD maka akan semakin meningkatkan IPM Kabupaten Berau.

Dari tabel hasil analisis regresi linier berganda pada di atas dapat kita lihat bahwa hasil uji t pada variabel JUmlah Penduduk (X1) diperoleh signifikansi sebesar 0,525 yang nilainya di atas 0,05. Artinya variabel jumlah Penduduk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau.

Nilai signifikasni variabel Investasi swasta (X2) sebesar 0,914 yang nilainya di atas 0,05. Artinya variabel Investasi swasta secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau.

Belanja Pemerintah (X3) seperti diperoleh signifikansi sebesar 0,726 yang nilainya di atas 0,05. Artinya variabel Belanja Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau.

Variabel PAD (Y1) seperti diperoleh signifikansi sebesar 0,115 yang nilainya di atas 0,05. Artinya variabel PAD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Berau.

Tabel Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh total

No	Direct Effect		Indirect Effect		Total Effect	
	Variabel	Nilai	Variabel	Nilai	Variabel	Nilai
1	$X_1 \rightarrow Y_1$	0,155				
2	$X_2 \rightarrow Y_1$	-0,683				
3	$X_3 \rightarrow Y_1$	0,625				
4	$X_1 \rightarrow Y_2$	2,149	$X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	12,630	$(X_1 \rightarrow Y_2) +$	12,785
					$(X_1 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2)$	
5	$X_2 \rightarrow Y_2$	0,341	$X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	2,004	$(X_2 \rightarrow Y_2) +$	1,321
					$(X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2)$	
6	$X_3 \rightarrow Y_2$	-1,568	$X_2 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2$	9,215	$(X_3 \rightarrow Y_2) +$	-8,590
					$(X_3 \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_2)$	
5	$Y_1 \rightarrow Y_2$	5,877				

V. Kesimpulan

1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.
2. Variabel investasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.
3. Variabel belanja daerah berpengaruh langsung dan tidak signifikan

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.

4. Variabel jumlah penduduk berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Berau.
5. Variabel investasi berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Berau.
6. Variabel belanja daerah berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Berau.
7. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Berau.
8. Variabel jumlah penduduk berpengaruh tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.
9. Variabel investasi berpengaruh tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.

10. Variabel belanja daerah berpengaruh tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau.

VI. Saran

1. Penambahan penduduk yang tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan sebagai penyebab tingginya angka kemiskinan harus diatasi oleh Pemkab Berau dengan terus mendorong agar pendidikan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penduduk miskin perlu dilibatkan dalam roda perekonomian terutama usaha mikro rumah tangga dengan memberikan akses permodalan, pemasaran, serta mengembangkan pelatihan kewirausahaan
2. Berau dengan memperluas kesempatan kerja melalui perbaikan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian di Kabupaten Berau. Dengan demikian, akan semakin besar pula tingkat pendapatan daerah.
3. Pengeluaran pemerintah diluar pengeluaran rutin dalam bentuk belanja daerah ditujukan untuk memicu atau bahkan meningkatkan

sendi-sendi perekonomian di Kabupaten Berau. Dengan terpicunya sektor-sektor yang ada dan meningkatnya produksi pada semua sektor, maka akan meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Berau.

4. Pemerintah kabupaten Berau seyogyanya dapat terus berupaya mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan
5. Pemerintah Kabupaten Berau seyogyanya dapat terus stabil dan berusaha membantu perkembangan sektor swasta yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Investasi swasta berperan mengurangi kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja..
6. Pemerintah Kabupaten Berau seyogyanya terus dapat membuat kebijaksanaan program dan penganggaran yang berorientasi

pertumbuhan ekonomi yang secara tidak langsung mendorong kesejahteraan masyarakat melalui prinsip *trickle down effect*. Ini merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan dengan member kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

7. Pemerintah Kabupaten Berau harus terus berupaya dalam tercapainya penguasaan atas sumber daya guna memperoleh pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan agar meningkat usia hidup panjang dan sehat dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis) dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi.
8. Pertumbuhan penduduk tinggi akan menaikkan output melalui penambahan tingkat dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penambahan penduduk tinggi harus diiringi dengan perubahan teknologi sehingga mampu mendorong

tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi.

9. Terus berupaya meningkatkan investasi swasta di Kabupaten Berau sehingga mampu mendorong peningkatan PAD kabupaten Berau dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
10. Pemerintah Kabupaten Berau harus terus memicu sektor-sektor yang ada dan meningkatnya produksi pada semua sektor, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Berau yang berujung kepada peningkatan kesejahteraanhidup masyarakatnya.

Arsyad, Lincoln, 2005, Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, 2nd ed.,. BPFE-UGM, Yogyakarta

Harahap, Sofyan Syafri. 2013. Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan Edisi 11. Rajawali Pers, Jakarta.

Lukman Syamsudin.2006.*Manajemen Keuangan Perusahaan (Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan)*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Sukirno, Sadono.2012. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers

DAFTAR PUSTAKA